



# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
Jl. Jend. Sudirman No. 47 Padang, Telp./Faks.(0751) 890720, 890721**

## Kata Pengantar

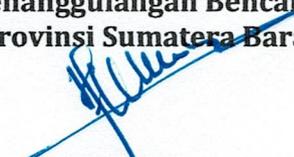
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berwenang menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana, BPBD Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.

Renja BPBD Provinsi Sumatera Barat ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan bidang Penanggulangan Bencana yang akan dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Program Unggulan Sumatera Barat Sehat dan Cerdas yaitu "*Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19*", dan Program Unggulan Sumatera Barat Berkeadilan yaitu "*Mengembangkan kota dan kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat dan komunitas*". Tantangan pembangunan bidang Penanggulangan Bencana dan permasalahan kerentanan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat yang cukup kompleks dan terkadang tidak terduga, membutuhkan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan dengan target dan sasaran yang ditetapkan.

Renja BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang nantinya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, guna terciptanya rasa aman menghadapi bencana bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Kita semua, Aamiin.

Padang, Februari 2022

**Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Sumatera Barat,**

  
**Jumaidi, S.Pd., M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670817 200003 1 006

## Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	38
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	43
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah .....	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	44
3.3. Program dan Kegiatan .....	44
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	49
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan dokumen yang berisikan usulan program kerja berikut perkiraan kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun kedua RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Dokumen ini disusun mengacu kepada rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang telah disusun dengan mengacu kepada rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Adapun Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagai acuan BPBD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan rancangan Renstra adalah "*Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan*". Untuk mewujudkan visi tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat maka dilaksanakanlah Misi ke-6, yaitu "*Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan*".

Renja Perangkat Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang berisikan penjabaran Renstra dan merupakan salah satu bahan dari Perangkat Daerah yang akan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Disamping itu, penyusunan Renja Perangkat Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja pembangunan pada periode sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Renja serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Renja Perangkat Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 juga memperhatikan ketersediaan sumber daya dan prioritas pembangunan daerah, serta memperhatikan kegiatan lintas

sektor dan sinergitas lintas perangkat daerah yang menjadi tupoksi BPBD Provinsi Sumatera Barat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat;
28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
29. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Renja Perangkat Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang operasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Renja Perangkat Daerah digunakan untuk penyusunan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat, RKPD Provinsi selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah untuk menjabarkan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun yaitu tahun 2023 berdasarkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- a. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- c. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- d. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- b. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- c. Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka BPBD merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tahun 2021, BPBD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Bidang Urusan Bencana yang terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.431.780.738,-, realisasi keuangan sebesar Rp.8.722.049.232,- (92,48%) dan realisasi fisik sebesar 100,00%, terdiri atas 8 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan rincian realisasi per sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Keluaran : dokumen perencanaan perangkat daerah (RKT, PK, PK perubahan, RKA, RKA pergeseran, RKA perubahan, DPA, DPA pergeseran, DPA perubahan) 9 dokumen; Dokumen Renstra dan Renja BPBD yang disusun 2 dokumen.
      - Hasil : meningkatnya perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah 100%.

- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.46.784.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.45.683.800,- atau sebesar 97,65% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Keluaran : dokumen evaluasi kinerja triwulan 4 dokumen; dokumen evaluasi perangkat daerah (LAKIP, LPPD, LKPj, Laporan Tahunan) 4 dokumen.
  - Hasil : meningkatnya perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.43.727.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.42.626600,- atau sebesar 97,48% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- b. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Keluaran : gaji dan tunjangan ASN BPBD untuk satu tahun sudah dianggarkan 46 orang.
  - Hasil : meningkatnya tertib administrasi keuangan 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.4.700.292.738,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.339.525.275,- atau sebesar 92,32% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Keluaran : jasa administrasi keuangan (pengelola keuangan, pengelola barang milik daerah, pengelola sistem informasi, petugas PPHPK) 12 bulan.
  - Hasil : meningkatnya tertib administrasi keuangan 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.402.228.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.229.868.500,- atau sebesar 57,15% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Keluaran : laporan aset akhir tahun 1 laporan; laporan keuangan akhir tahun 1 laporan.

- Hasil : meningkatnya tertib administrasi keuangan 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.85.109,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.84.987.666,- atau sebesar 99,86% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- Keluaran : laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran 13 laporan.
  - Hasil : meningkatnya tertib administrasi keuangan 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.41.645.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.41.343.600,- atau sebesar 99,28% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Keluaran : laporan barang milik daerah semesteran dan akhir tahun 3 laporan.
  - Hasil : meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.111.393.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.108.285.021,- atau sebesar 97,33% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 2) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Keluaran : pembukuan dan inventarisasi barang milik daerah 12 bulan.
  - Hasil : meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.5.542.750,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5.525.000,- atau sebesar 99,68% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - Keluaran : pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan 92 stel.
    - Hasil : meningkatnya disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur 100%.
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.65.250.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.65.250.000,- atau sebesar 100,00% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
  - 2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
    - Keluaran : ASN BPBD yang mengikuti Bimtek 10 orang.
    - Hasil : meningkatnya disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur 100%.
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.37.739.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.29.283.500,- atau sebesar 77,59% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Keluaran : komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 12 bulan.
    - Hasil : meningkatnya tertib administrasi umum 100%.
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.29.336.360,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.29.315.360,- atau sebesar 99,93% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Keluaran : peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 12 bulan.
    - Hasil : meningkatnya tertib administrasi umum 100%.

- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.105.982.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.99.260.000,- atau sebesar 93,66% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Keluaran : makan dan minum yang disediakan untuk pertemuan dan tamu 12 bulan.
  - Hasil : meningkatnya tertib administrasi umum 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.66.822.145,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.62.804.500,- atau sebesar 93,99% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
- Keluaran : barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 12 bulan.
  - Hasil : meningkatnya tertib administrasi umum 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.39.750.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.39.732.500,- atau sebesar 99,95% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Keluaran : bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 6 jenis.
  - Hasil : meningkatnya tertib administrasi umum 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.34.980.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.980.000,- atau sebesar 100,00% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Keluaran : rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah 12 bulan.
  - Hasil : meningkatnya tertib administrasi umum 100%.

- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.482.187.766,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.480.987.056,- atau sebesar 99,75% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Keluaran : jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan 1 unit.
    - Hasil : meningkatnya tertib administrasi umum 100%.
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.483.279.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.477.350.000,- atau sebesar 98,77% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
  - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
    - Keluaran : pengadaan meubeler yang diadakan 4 jenis.
    - Hasil : meningkatnya tertib administrasi umum 100%.
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.75.422.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.74.297.000,- atau sebesar 98,51% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
  - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    - Keluaran : peralatan gedung kantor yang diadakan 17 unit.
    - Hasil : meningkatnya tertib administrasi umum 100%.
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.281.874.020,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.274.197.500,- atau sebesar 97,28% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Keluaran : jumlah surat yang didistribusikan 500 kali.
    - Hasil : meningkatnya tertib administrasi umum 100%.

- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.9.565.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.545.500,- atau sebesar 99,80% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Keluaran : air 12 bulan; internet 100 mbps; listrik 130.000 kwh; rekening tagihan yang dibayarkan 12 bulan; telepon 2 rekening.
  - Hasil : meningkatnya tertib administrasi umum 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.288.361.059,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.202.132.154,- atau sebesar 70,10% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Keluaran : dukungan penetapan new normal 12 bulan; jasa dan honor PTT 12 bulan; jasa kebersihan kantor 12 bulan; jasa kesehatan jasmani (senam mingguan) 12 bulan; jasa kesehatan rohani (wirid mingguan, program ramadhan) 12 bulan; jasa pengaman kantor 12 bulan; jasa rohaniwan 12 bulan; jasa sopir kantor 12 bulan.
  - Hasil : meningkatnya tertib administrasi umum 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.894.222.834,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.870.139.750,- atau sebesar 97,31% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Keluaran : kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 33 unit.
  - Hasil : meningkatnya tertib administrasi umum 100%.

- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.656.730.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.638.748.900,- atau sebesar 97,26% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Keluaran : gedung kantor yang dipelihara 1 unit.
  - Hasil : meningkatnya tertib administrasi umum 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.357.505.764,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.351.068.900,- atau sebesar 98,20% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Keluaran : peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 12 bulan.
  - Hasil : meningkatnya tertib administrasi umum 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.86.050.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.85.111.150,- atau sebesar 98,91% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
2. Program Penanggulangan Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.869.908.368,-, realisasi keuangan sebesar Rp.16.350.347.532,- (91,50%) dan realisasi fisik sebesar 100,00%, terdiri atas 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan rincian realisasi per sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
- Keluaran : terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana 1 laporan.
  - Hasil : meningkatnya penyebarluasan data dan informasi bencana 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.360.925.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.321.833.965,- atau sebesar 89,17% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

- 2) Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
  - Keluaran : terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan, terlaksananya kampanye publikasi media, pameran dan pembuatan baliho kebencanaan 3 kali.
  - Hasil : meningkatnya penyebarluasan data dan informasi bencana 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.567.572.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.515.579.447,- atau sebesar 90,84% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
  - 1) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
    - Keluaran : terlaksananya pelatihan relawan kebencanaan kabupaten/kota 5 angkatan/19 kabupaten/kota
    - Hasil : meningkatnya kesiapan kelembagaan dan masyarakat menghadapi bencana 100%.
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.2.161.100.950,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.114.063.418,- atau sebesar 97,82% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
  - 2) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
    - Keluaran : terfasilitasinya petugas pusdalops PB 12 bulan.
    - Hasil : meningkatnya kesiapan kelembagaan dan masyarakat menghadapi bencana 100%.
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.1.399.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.153.891.904,- atau sebesar 82,48% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
    - Keluaran : jumlah sarana dan prasarana mitigasi bencana yang tersedia 1 paket

- Hasil : meningkatnya kesiapan kelembagaan dan masyarakat menghadapi bencana 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.1.431.169.560,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.295.087.263,- atau sebesar 90,49% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana
- Keluaran : terlaksananya pembinaan kelembagaan PRB, Jambore PRB, Rakor PRB dan mengikuti bulan PRB nasional 19 kabupaten/kota.
  - Hasil : meningkatnya kesiapan kelembagaan dan masyarakat menghadapi bencana 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.584.722.750,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.484.726.366,- atau sebesar 82,90% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 5) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- Keluaran : terlaksananya pembinaan KSB Kab/Kota 3 angkatan/19 kabupaten/kota; terlaksananya penumbuhan nagari tangguh, terlatihnya fasilitator DESTANA, terlaksananya pembinaan nagari tangguh dan terlaksananya sosialisasi DESTANA 2 desa/nagari/1 kabupaten/kota.
  - Hasil : meningkatnya kesiapan kelembagaan dan masyarakat menghadapi bencana 100%.
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.1.173.178.050,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.057.569.500,- atau sebesar 90,15% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 6) Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi
- Keluaran : terlaksananya Bimtek dan workshop JITU PASNA 9 kali/115 orang; terlaksananya pertemuan teknis dan koordinasi JITU PASNA 2 kali/80 orang; terlaksananya survey, verifikasi, dan monev kegiatan rekonstruksi pasca bencana 75%; terlaksananya survey, verifikasi, monitoring

dan evaluasi kegiatan rehabilitasi pasca bencana 2 kali/70 orang; tersedianya logistik peralatan kebencanaan COVID-19 kabupaten/kota.

- Hasil : meningkatnya kesiapan kelembagaan dan masyarakat menghadapi bencana 100%.
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.7.639.923.083,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.6.991.269.198,- atau sebesar 91,51% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

7) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

- Keluaran : jumlah koordinasi TRC kabupaten/kota yang terlaksana 1 kali.
- Hasil : meningkatnya kesiapan kelembagaan dan masyarakat menghadapi bencana 100%.
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.17.229.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.15.615.550,- atau sebesar 90,63% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

8) Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- Keluaran : terlaksananya simulasi penanggulangan bencana 1 kali.
- Hasil : meningkatnya kesiapan kelembagaan dan masyarakat menghadapi bencana 100%.
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.391.178.350,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.352.207.327,- atau sebesar 90,04% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana

1) Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana

- Keluaran : jumlah koordinasi penanganan tanggap darurat bencana yang terlaksana 20 provinsi/kabupaten/kota; terkoordinasinya pelaksanaan penanganan tanggap darurat secara terpadu dan terdaftarnya penanganan tanggap darurat yang dilaksanakan di kabupaten/kota 19

kabupaten/kota; terkoordinasinya pelaksanaan penanganan tanggap darurat secara terpadu di kabupaten/kota 19 kabupaten/kota.

- Hasil : meningkatnya penanganan tanggap darurat 100%.
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.366.312.075,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.365.602.962,- atau sebesar 99,81% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Keluaran : tersedianya sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (peralatan lapangan dan logistik kebencanaan) 2 paket.
- Hasil : meningkatnya penanganan tanggap darurat 100%.
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.1.431.904.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.346.506.768,- atau sebesar 94,04% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

- Keluaran : pemutakhiran data dan informasi kebencanaan 1 laporan.
- Hasil : meningkatnya kesiapan kelembagaan dan masyarakat menghadapi bencana 100%.
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.120.999.850,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.115.522.845,- atau sebesar 95,47% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

- Keluaran : terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana 1 laporan.

- Hasil : meningkatnya kesiapan kelembagaan dan masyarakat menghadapi bencana 100%.
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.224.692.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.220.871.019,- atau sebesar 98,30% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Berdasarkan pencapaian target kinerja masing-masing program dan kegiatan di atas, dapat disimpulkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak menemui kendala yang berarti, namun demikian terdapat beberapa sub kegiatan yang capaian target penyerapan anggarannya belum sesuai dengan target yang direncanakan (<90%). Sub kegiatan tersebut terdiri dari 3 (tiga) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 3 (tiga) pada Program Penanggulangan Bencana, adapun faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya target penyerapan anggaran untuk beberapa sub kegiatan tersebut adalah lebih disebabkan karena efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Hasil pencapaian target kinerja program dan kegiatan di atas telah mencerminkan capaian Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 pada tahun pertama, namun dengan terbatasnya alokasi anggaran untuk program dan kegiatan tahun 2021 membuat pencapaian target indikator Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 secara keseluruhan perlu dievaluasi dan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam perencanaan serta penganggaran program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana ke depan sehingga dapat diakomodasi pada APBD periode berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra BPBD sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1 05 01 1 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN BPBD untuk satu Tahun sudah dianggarkan	50	-	50	50	100	50	50	50	
1 05 01 1 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	12	-	12	12	100	12	20	20	
1 05 01 1 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPP, SPM dan Pengesahan SPJ yang diterbitkan							3	3	
1 05 01 1 02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akintansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD yang disusun							1	1	
1 05 01 1 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1	-	1	1	100	1	1	1	
1 05 01 1 02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan yang disiapkan							1	1	
1 05 01 1 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disiapkan	13	-	13	13	100	13	13	13	
1 05 01 1 02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun							1	1	
1 05 01 1 03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>95</b>	<b>-</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>95</b>			
1 05 01 1 03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen usulan RKBMD pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan serta perhitungan standar kebutuhan yang disusun							1	1	
1 05 01 1 03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan penetapan nilai barang milik daerah							1	1	
1 05 01 1 03 04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban							1	1	
1 05 01 1 03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan Akhir Tahun	3	-	3	3	100	3			
		Dokumen barang milik daerah semesteran dan akhir tahun yang disusun							3	3	
1 05 01 1 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembukuan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah	12	-	12	12	100	12			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Jumlah dokumen laporan barang milik daerah							1	1	
1 05 01 1 03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan pinjam pakai							1	1	
		Jumlah dokumen usulan sewa							1	1	
1 05 01 1 05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	95	-	95	95	100	95			
1 05 01 1 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan yang disediakan	80	-	80	80	100	80			
		Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya							90	90	
1 05 01 1 05 3	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola							45	45	
1 05 01 1 05 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan							12	12	
1 05 01 1 05 5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah aparatur yang dinilai kinerjanya							45	45	
1 05 01 1 05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat							3	3	
1 05 01 1 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	95	-	95	95	100	95			
1 05 01 1 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	-	12	12	100	12	116	116	
1 05 01 1 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	-	12	12	100	12			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan							349	349	
1 05 01 1 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	12	-	12	12	100	12			
		Makan dan Minum yang disediakan untuk Pertemuan dan Tamu	12	-	12	12		12			
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan							1.083	1.083	
1 05 01 1 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	-	12	12	100	12	51.479	51.479	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1 05 01 1 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6	-	6	6	100	6	7	7	
1 05 01 1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	12	-	12	12	100	12	1	1	
1 05 01 1 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</b>	<b>95</b>	<b>-</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>95</b>			
1 05 01 1 07 04	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diadakan	2	-	2	2	100	2			
1 05 01 1 07 05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubeler yang Diadakan	4	-	4	4	100	4			
1 05 01 1 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru							18	18	
1 05 01 1 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	8	-	8	8	100	8	3	3	
		Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor							2	2	
1 05 01 1 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
1 05 01 1 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Didistribusikan	500	-	500	500	100	500			
		Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun							500	500	
1 05 01 1 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	130.000	-	130.000	130.000	100	130.000	1.375	1.375	
		Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	290	-	290	290	100	290	100	100	
		Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	2	-	2	2	100	2	2	2	
1 05 01 1 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dukungan Penetapan New Normal	12	-	12	12	100	12			
		Jasa dan Honor PTT	12	-	12	12	100	12			
		Jasa Kebersihan Kantor	12	-	12	12	100	12			
		Jasa Kesehatan Jasmani (Senam Mingguan)	12	-	12	12	100	12			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Catatan			
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Target Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12			
		Jasa Kesehatan Rohani (Wirid Mingguan, Program Ramadhan)	12	-	12	12	100	12						
		Jasa Pengaman Kantor	12	-	12	12	100	12						
		Jasa Rohaniwan	12	-	12	12	100	12						
		Jasa Sopir Kantor	12	-	12	12	100	12						
		Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia							26	26				
1	05	01	1	09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik</b>	5	-	5	5	100	5		
1	05	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara					1	1	
1	05	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	33	-	33	33	100	33	
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						51	51	
1	05	01	1	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara					1	1	
1	05	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara					1	1	
1	05	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					99	99	
1	05	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang Dipelihara	1	-	1	1	100	1	
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab						1	1	
1	05	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/rehab					5	5	
1	05	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara	12	-	12	12	100	12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab							2	2	
1 05 03		<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	55	-	55	55	100	55			
1 05 03 1 01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>	55	-	55	55	100	55			
1 05 03 1 01 01		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	2	-	2	2	100	2			
1 05 03 1 01 02		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	3	-	3	3	100	3			
		Kampanye/publikasi media/pameran/pembuatan baliho kebencanaan yang dilaksanakan							4	4	
		Sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan di masyarakat yang dilaksanakan							4	4	
		Sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan di sekolah/kampus yang dilaksanakan							50	50	
1 05 03 1 02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		-			-				
1 05 03 1 02 02		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	5/19	-	5/19	5/19	100	5/19			
		Terlaksananya Pembinaan KSB Kabupaten/Kota	1	-	1	1	100	1			
		Pelatihan kebencanaan bagi aparaturnya yang dilaksanakan							35	35	
		Pelatihan kebencanaan bagi relawan yang dilaksanakan							35	35	
1 05 03 1 02 03		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	12	-	12	12	100	12			
		Terfasilitasinya Petugas Pusdalops PB									
		Petugas PUSDALOPS PB yang terfasilitasi							12	12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Target Capaian	
					6	7	8 = (7/6)		9	10 = (5+7+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1 05 03 1 02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana yang Tersedia	1	-	1	1	100	1			
		Sarana dan prasarana kesiapsiagaan menghadapi bencana (peralatan perlindungan, EWS tsunami/letusan gunung api/banjir/longsor) yang disediakan							33	33	
1 05 03 1 02 05	Pengelolaan Risiko Bencana	Terlaksananya Pembinaan PRB, Jambore PRB, Rakor PRB dan Mengikuti Bulan PRB Nasional	19	-	19	19	100	19			
		Jambore tingkat Provinsi yang dilaksanakan							-	-	
		Mitigasi daerah rawan bencana yang dilaksanakan							16	16	
		pembinaan kelembagaan pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan							20	20	
		Rapat koordinasi PRB tingkat Provinsi yang dilaksanakan							1	1	
1 05 03 1 02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Penumbuhan Nagari Tangguh, Terlatihnya Fasilitator DESTANA, Terlaksananya Sosialisasi DESTANA	1/2	-	1/2	1/2	100	1/2			
		Pembinaan kelompok siaga bencana (KSB) di kabupaten/kota yang dilaksanakan							30	30	
		Sosialisasi/penumbuhan/pembinaan nagari tangguh bencana (DESTANA) yang dilaksanakan							35	35	
1 05 03 1 02 07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Terlaksananya Bimtek dan Workshop JITU PASNA	3/109	-	3/109	3/109	100	3/109	25	25	
		Terlaksananya Pertemuan Teknis dan Koordinasi JITU PASNA	40	-	40	40	100	40			
		Terlaksananya Survey, Verifikasi, dan Monev Kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana	1	-	1	1	100	1			
		Terlaksananya Survey, Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana	35	-	35	35	100	35			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Catatan			
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Target Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12			
		Tersedianya Logistik Kebencanaan COVID-19	19	-	19	19	100	19						
		Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dikoordinasikan							1	1				
		Rapat koordinasi/pertemuan teknis JITU PASNA yang dilaksanakan							28	28				
		Sarana prasarana pemulihan daerah pasca bencana yang disediakan							1	1				
1	05	03	1	02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah TRC Kab/Kota yang Terbentuk dan Terbina	270	-	-	-	-		
						Jumlah Koordinasi TRC Kab/Kota yang terlaksana		1		1	100		1	
						Pembinaan/pelatihan TRC Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaksanakan				35	35			
1	05	03	1	02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Simulasi Penanggulangan Bencana	1	-	1	1	100		
						Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilaksanakan						1	1	
1	05	03	1	02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencanan	Dokumen rencana penanggulangan bencana (RPKB) yang disusun						1	1
1	05	03	1	03		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana</b>	55	-	55	55	100	55	
1	05	03	1	03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana yang Terlaksana	20	-	20	20	100	20	
						Terkoordinasinya Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Secara Terpadu dan Terdaftarnya Penanganan Tanggap Darurat yang Dilaksanakan di Kab/Kota		19	-	19	19	100	19	
						Penanganan darurat bencana secara terpadu yang dikoordinasikan							1	1
1	05	03	1	03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana yang dikoordinasikan						1	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1 05 03 1 03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana (Peralatan Lapangan dan Logistik Kebencanaan)	2	-	2	2	100	2			
		Logistik/peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang disediakan							2	2	
1 05 03 1 03 06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Penanganan epidemi/wabah penyakit secara terpadu yang dikoordinasikan							1	1	
1 05 03 1 04	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana</b>	55	-	55	55	100	55			
1 05 03 1 04 04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Sistem Informasi Kebencanaan	2	-	2	2	100	2			
		Laporan hasil pengukuran/penyebarluasan basis data kebencanaan yang dilaksanakan							2	2	
1 05 03 1 04 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana	1	-	1	1	100	1			
		Laporan hasil kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilaksanakan							1	1	

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2021, secara keseluruhan dapat dikatakan baik walaupun dalam beberapa hal masih perlu adanya peningkatan dan penajaman beberapa sub kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan, terutama sub kegiatan yang terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana serta penanganan tanggap darurat bencana. Meskipun capaian kinerja sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan rata-rata sebesar 100% yaitu capaian kinerja sasaran seluruhnya adalah optimal, namun capaian Renstra BPBD Tahun 2021-2026 secara keseluruhan perlu dievaluasi dalam rangka pencapaian target akhir indikator Renstra BPBD sehingga pengalokasian anggaran dari APBD untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat terpenuhi secara memadai.

Adapun sasaran BPBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 berdasarkan Renstra BPBD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana;
2. Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut di atas, maka BPBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 melaksanakan 2 program, 12 kegiatan dan 39 sub kegiatan yang berorientasi kepada penerapan standar pelayanan minimal (SPM) Sub Bidang Urusan Bencana dan prinsip-prinsip penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Penerapan dan pemenuhan SPM Sub Bidang Urusan Bencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal meliputi jenis dan mutu pelayanan dasar sebagai berikut :

1. Pelayanan informasi rawan bencana, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :
  - a. Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana;
  - b. Kegiatan penyusunan kajian risiko bencana; dan
  - c. Kegiatan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana.
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :
  - a. Kegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana;
  - b. Kegiatan pembuatan rencana kontinjensi;
  - c. Kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi;
  - d. Kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - e. Kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
  - f. Kegiatan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :
  - a. Kegiatan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
  - b. Kegiatan respon cepat darurat bencana;
  - c. Kegiatan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
  - d. Kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
  - e. Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Pemenuhan SPM Sub Bidang Urusan Bencana dapat dilihat pada tabel program dan kegiatan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 di Bab III. Namun demikian, penerapan dan pencapaian SPM di provinsi tidak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 karena penerapan dan pencapaian SPM berada pada kabupaten/kota. Namun demikian, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang merupakan tupoksi BPBD terdapat prinsip-prinsip yang dianut dan harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu :

1. Cepat dan tepat, yaitu bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan;
2. Prioritas, yaitu bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia;
3. Koordinasi dan keterpaduan; koordinasi yaitu bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung; keterpaduan yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
4. Berdaya guna dan berhasil guna; berdaya guna yaitu bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan; berhasil guna yaitu bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
5. Transparansi dan akuntabilitas; transparansi yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; akuntabilitas yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
6. Kemitraan, yaitu bahwa penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah tetapi dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat luas, bahkan juga dilakukan dengan organisasi atau lembaga di luar negeri, termasuk dengan pemerintahannya.

7. Pemberdayaan, yaitu bahwa upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengetahui, memahami dan melakukan langkah-langkah antisipasi, penyelamatan dan pemulihan bencana.
8. Non diskriminatif, yaitu bahwa dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
9. Non proletisi, yaitu bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2.** Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP 6/2008)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah dokumen perencanaan penanggulangan bencana (RPB, RAD-PRB, Renkon per-jenis bencana, SOP kebencanaan) yang tersedia (laporan)	-	-	2				2				
2.	Jumlah data base kebencanaan (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang tersedia (laporan)	-	-	1				1				
3.	Jumlah data spasial kebencanaan (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang tersedia (laporan)	-	-	1				1				
4.	Jumlah kampanye, publikasi media, pameran, pembuatan balho dan brosur kebencanaan yang terlaksana (paket)	-	-	1				1				
5.	Jumlah peserta sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan yang terlaksana (orang)	-	-	350				350				
6.	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana yang terlaksana (provinsi dan kabupaten/kota)	-	-	20				20				
7.	Honorarium dan operasional anggota Unsur Pengarah BPBD yang tersedia (orang)	-	-	11				11				
8.	Jumlah TRC provinsi/kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina	-	-	20				20				
9.	Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) provinsi/kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina	-	-	1/19				1/19				
10.	Jumlah Nagari/Desa/Kelurahan Tangguh kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina	-	-	12				12				
11.	Jumlah relawan kebencanaan provinsi/kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina (orang)	-	-	300				300				
12.	Honorarium dan operasional petugas Pusdalops PB yang tersedia (orang)	-	-	70				70				
13.	Jumlah peserta simulasi dan pelatihan kebencanaan yang terlaksana (orang)	-	-	500				500				
14.	Jumlah sarana dan prasarana pengurangan resiko bencana (TES dan jalur evakuasi) yang tersedia (paket)	-	-	1				1				- SKPD penanggung jawab : Dinas PUPR
15.	Jumlah sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana (sistem peringatan dini) yang tersedia (paket)	-	-	1				1				

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP 6/2008)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (peralatan lapangan dan logistik kebencanaan stock opname) yang tersedia (paket)	-	-	1				1				
17.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tersedia (paket)	-	-	1				1				- Berdasarkan wilayah/ daerah pasca bencana yang dipulihkan
18.	Jumlah koordinasi penanganan tanggap darurat bencana yang terlaksana (provinsi dan	-	-	20				20				
19.	Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan siaga darurat dan tanggap darurat yang terlaksana (%)	-	-	20				20				
20.	Persentase pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU Pasna) yang terlaksana (%)	-	-	75				75				
21.	Persentase koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terlaksana (%)	-	-	75				75				
22.	Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terlaksana (%)	-	-	75				75				
<b>Berdasarkan Indikator Tahun 2021</b>												
1	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana (laporan)					2				2		
	Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan, terlaksananya kampanye publikasi media, pameran dan pembuatan balihoo kebencanaan (kali)					3				3		
	Terlaksananya pelatihan relawan kebencanaan kabupaten/kota (kab/kota,angkatan)					5/19				5/19		
	Terfasilitasinya petugas pusdalops PB (bulan)					12				12		
	Jumlah sarana dan prasarana mitigasi bencana yang tersedia (paket)					1				1		
	Terlaksananya pembinaan kelembagaan PRB, Jambore PRB, RAKOR PRB dan mengikuti bulan PRB Nasional (kab/kota)					19				19		
	Terlaksananya pembinaan KSB kab/kota (kab/kota/angkatan)					3/19				3/19		
	Terlaksananya penumbuhan nagari tangguh, terlatihnya fasilitator DESTANA, terlaksananya nagari tangguh dan terlaksananya sosialisasi DESTANA (kab/kota/angkatan)					1,2				1/2		
	Terlaksananya Bimtek dan workshop Jitu Pasna ( orang/kali)					3/115				3/115		

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP 6/2008)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Terlaksananya pertemuan teknis dan koordinasi Jitu Pasna ( orang/kali)				2/80				2/80			
	Terlaksananya survey, verifikasi dan movev kegiatan rekonstruksi pasca bencana (%)				75				75			
	Terlaksananya survey, verifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi pasca bencana (orang/kali)				2/70				2/70			
	tersedianya logistik peralatan kebencanaan Covid-19 (kab/kota)				19				19			
	Jumlah TRC kab/kota yang terbentuk dan terbina (kali)				1				1			
	Terlaksananya simulasi penanggulangan bencana (kali)				1				1			
	Jumlah koordinasi penanganan tanggap darurat bencana yang terlaksana (provinsi dan kabupaten/kota)				20				20			
	Terkoordinasinya pelaksanaan penanganan tanggap darurat secara terpadu di kab/kota (kab/kota)				19				19			
	Tersedianya sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (peralatan lapangan dan logistik kebencanaan) (paket)				2				2			
	Pemutakhiran data dan informasi kebencanaan (laporan)				1				1			
	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana (laporan)				1				1			
	<b>Berdasarkan Rancangan RPJMD 2021-2026 dan Rancangan Renstra BPBD 2021-2026</b>											
23.	Dokumen kajian risiko bencana yang disusun (dokumen)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
24.	Sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan di sekolah/kampus yang dilaksanakan (kali)	-	-	-	-	50	400	-	-	50	400	
25.	Sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan di masyarakat yang dilaksanakan (kali)	-	-	-	-	4	10	-	-	4	10	
26.	Kampanye/publikasi media/pameran/pembuatan balho kebencanaan yang dilaksanakan (kali)	-	-	-	-	4	10	-	-	4	10	
27.	Dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) provinsi/revisi dokumen RPB provinsi yang disusun (dokumen)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
28.	Pelatihan kebencanaan bagi relawan yang dilaksanakan (orang)	-	-	-	-	35	100	-	-	35	100	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP 6/2008)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	Pelatihan kebencanaan bagi aparaturnya yang dilaksanakan (orang)	-	-	-	-	35	100	-	-	35	100	
30.	Petugas PUSDALOPS PB yang difasilitasi (bulan)	-	-	-	-	12	12	-	-	12	12	
31.	Sarana dan prasarana mitigasi bencana (jalur evakuasi/ TES bencana tsunami) yang disediakan (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sarana dan prasarana kesiapsiagaan menghadapi bencana (EWS tsunami/letusan gunung api/banjir/longsor) yang disediakan (unit)	-	-	-	-	33	100	-	-	-	100	
32.	Sarana dan prasarana kesiapsiagaan menghadapi bencana (EWS tsunami/letusan gunung api/banjir/longsor) yang disediakan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	
33.	Pembinaan kelembagaan pengurangan risiko bencana (PRB) yang dilaksanakan (provinsi/kabupaten/kota)	-	-	-	-	20	20	-	-	20	20	
34.	Jambore PRB tingkat provinsi yang dilaksanakan (kali)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
35.	Rapat koordinasi PRB tingkat provinsi yang dilaksanakan (kali)	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	
36.	Mitigasi daerah rawan bencana yang dilaksanakan (kabupaten/kota)	-	-	-	-	19	19	-	-	19	19	
37.	Pembinaan kelompok siaga bencana (KSB) di kabupaten/kota yang dilaksanakan (kali)	-	-	-	-	30	100	-	-	30	100	
38.	Sosialisasi/penumbuhan/pembinaan nagari tangguh bencana (DESTANA) yang dilaksanakan (nagari/desa/kelurahan)	-	-	-	-	35	100	-	-	35	100	
39.	Bimbingan teknis/workshop JITU PASNA yang dilaksanakan (orang)	-	-	-	-	25	70	-	-	25	70	
40.	Rapat koordinasi/pertemuan teknis JITU PASNA yang dilaksanakan (orang)	-	-	-	-	28	70	-	-	28	70	
41.	Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dikoordinasikan (laporan)	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	
42.	Sarana dan prasarana pemulihan daerah pasca bencana yang disediakan (paket)	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	
43.	Pembinaan/pelatihan TRC provinsi/kabupaten/kota yang dilaksanakan (orang)	-	-	-	-	35	70	-	-	35	70	
44.	Dokumen rencana kontinjensi per jenis bencana yang disusun (dokumen)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP 6/2008)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45.	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilaksanakan (kali)	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	
46.	Dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) yang disusun (dokumen)	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
47.	Penanganan kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis secara terpadu yang dikoordinasikan (laporan)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
48.	Penanganan darurat bencana secara terpadu yang dikoordinasikan (laporan)	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	
49.	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana yang dikoordinasikan (laporan)	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	
50.	Logistik/peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang disediakan (paket)	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	
51.	Penanganan darurat bencana secara terpadu yang dikoordinasikan (laporan)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
52.	Penanganan epidemi/wabah penyakit secara terpadu yang dikoordinasikan (laporan)	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	
53.	Dokumen regulasi penanggulangan bencana daerah yang disusun (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54.	Pembinaan/pelatihan pengembangan kapasitas aparatur penanggulangan bencana yang dilaksanakan (provinsi/kabupaten/kota)	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	
55.	Dokumen kerjasama antar lembaga dan mitra dalam penanggulangan bencana yang disediakan (dokumen)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
56.	Pengukuran/penyebarluasan basis data kebencanaan yang dilaksanakan (laporan)	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	
57.	Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilaksanakan (laporan)	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu penting yang dihadapi dalam pengembangan kelembagaan BPBD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat antara lain :

1. Penyebarluasan data dan informasi bencana;
2. Kesiapan kelembagaan dan masyarakat menghadapi bencana;
3. Penanganan tanggap darurat;
4. Sistem dasar penanggulangan bencana.

Dalam mengamati berbagai isu penting tersebut, BPBD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kondisi dan sinergi program dengan lintas Perangkat Daerah Provinsi dan perangkat daerah/lembaga teknis yang membidangi penanggulangan bencana di kabupaten/kota melalui rapat-rapat koordinasi, walaupun hasilnya belum dapat dikatakan optimal. Salah satu sinergi program dan kegiatan penanggulangan bencana adalah dengan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas BMCKTR) yaitu terkait dengan *sharing* kegiatan mitigasi bencana, seperti : perencanaan serta pembuatan TES dan jalur evakuasi dilakukan oleh Dinas BMCKTR; simulasi dan pelatihan, serta sosialisasi dan diseminasi mitigasi bencana kepada aparaturnya dan masyarakat dilakukan oleh BPBD.

Untuk sinergi program dan kegiatan dengan kabupaten/kota pada dasarnya juga telah dilaksanakan dengan melakukan simulasi dan pelatihan terkait kesiapsiagaan bencana maupun sosialisasi dan diseminasi kebencanaan, seperti : penanganan tanggap darurat, pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC), pembinaan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB), manajemen kontingensi, sosialisasi Rencana Kontingensi (Renkon), Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat, dan sebagainya.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tupoksi BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Belum lengkapnya dokumen perencanaan penanggulangan bencana di kabupaten/kota;
2. Masih kurangnya akses dan keakuratan data informasi bencana Indonesia (DIBI);
3. Belum maksimalnya diseminasi dan sosialisasi kebencanaan;
4. Masih ada provinsi/kabupaten/kota yang belum membentuk dan membina tim reaksi cepat penanggulangan bencana (TRC PB);
5. Masih ada provinsi/kabupaten/kota yang belum membentuk Forum PRB;
6. Masih ada kabupaten/kota yang belum membentuk dan membina nagari tangguh;
7. Belum maksimalnya pembinaan relawan kebencanaan di kabupaten/kota.
8. Belum memadainya operasional pusat pengendalian operasional penanggulangan bencana (PUSDALOPS PB);
9. Belum maksimalnya simulasi dan pelatihan kebencanaan bagi aparatur dan masyarakat;
10. Belum memadainya ketersediaan tempat evakuasi sementara (TES) dan jalur evakuasi di wilayah rawan bencana;
11. Belum memadainya ketersediaan peralatan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini bencana;
12. Belum memadainya ketersediaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan;
13. Belum memadainya ketersediaan peralatan penunjang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
14. Belum maksimalnya koordinasi siaga darurat dan penanganan tanggap darurat di wilayah bencana;
15. Belum maksimalnya pelaksanaan operasi penanganan siaga darurat dan penanganan darurat bencana sesuai rencana kontingensi (Renkon) per jenis bencana;
16. Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat di wilayah bencana;

17. Masih ada kabupaten/kota yang belum menyusun pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) pada wilayah dengan status bencana;
18. Belum maksimalnya koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana;

Isu-isu penting dan strategis yang dapat direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perumusan program dan kegiatan prioritas untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya kebijakan percepatan penyusunan peraturan dan prosedur operasional standar bidang penanggulangan bencana yang komprehensif;
2. Perlu dilakukan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana;
3. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta peningkatan sarana dan prasarana baik operasional, tanggap darurat, dan gedung kantor yang representatif guna mendukung tupoksi BPBD Provinsi Sumatera Barat;
4. Perlu adanya kebijakan anggaran guna penyediaan dana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana sehingga tupoksi BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan secara optimal.

#### **2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran, BPBD Provinsi Sumatera Barat juga memperhatikan usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota. Usulan program dan kegiatan tersebut berasal dari usulan yang ditujukan langsung kepada BPBD, hasil pengumpulan informasi yang dilakukan sendiri maupun dari penelitian lapangan Perangkat Daerah Provinsi lainnya, serta

aspirasi dari DPRD Provinsi Sumatera Barat. Secara umum usulan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian program unggulan Sumbar Berkeadilan yang ditujukan untuk mengembangkan kota dan kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat dan komunitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3**

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A.	Program Penanggulangan Bencana				
I.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
1.	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah penguatan/ peningkatan kapasitas nagari tangguh bencana (DESTANA) yang dilakukan	2 nagari	Usulan disertai proposal
		Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah penguatan/ peningkatan kapasitas kelompok siaga bencana (KSB) yang dilakukan	5 kelompok	-
		Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah penguatan/ peningkatan kapasitas kelompok siaga bencana (KSB) yang dilakukan	5 kelompok	-

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Kabupaten Pasaman	Jumlah penguatan/ peningkatan kapasitas kelompok siaga bencana (KSB) yang dilakukan	2 kelompok	-
		Kota Padang	Jumlah penguatan/ peningkatan kapasitas kelompok siaga bencana (KSB) yang dilakukan	2 kelompok	-
		Kota Padang Panjang	Jumlah penguatan/ peningkatan kapasitas kelompok siaga bencana (KSB) yang dilakukan	5 kelompok	-
		Kota Pariaman	Jumlah penguatan/ peningkatan kapasitas nagari tangguh bencana (DESTANA) yang dilakukan	2 desa/ kelurahan	Usulan disertai proposal

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah**

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada Bab II Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa, penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Sesuai dengan kebijakan dan program pembangunan daerah pada rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Provinsi Sumatera Barat secara umum telah memiliki potensi sumber daya untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana, namun dalam implementasinya terdapat permasalahan dalam pengorganisasiannya sehingga belum terlaksana secara sistematis.

Salah satu tugas pokok BPBD Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009, adalah menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata. Sedangkan fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat, adalah :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pelayanan dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya pelaksanaan kewenangan yang lebih intensif dan profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara prima sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan masyarakat. Disamping itu, dalam rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 telah tercantum arah kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat, yaitu "*Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana*".

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sebagaimana telah tertuang dalam rancangan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 bahwa tujuan dari penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat adalah "*Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana*". Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana;
2. Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah kondisi geografis Sumatera Barat yang merupakan daerah rawan bencana alam gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, letusan gunung api dan angin puting beliung yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan kerugian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana sehingga dibutuhkan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara terpadu dan terkoordinir. Mengingat penyelenggaraan penanggulangan bencana bersifat holistik dan pentahelix, lintas sektor dan wilayah, maka pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat tidak akan terselenggara dengan baik tanpa adanya keterlibatan penuh dan sinergis dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.

Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 telah menetapkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan merumuskan program prioritas pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang dirumuskan dalam Program Unggulan Sumatera Barat Sehat dan Cerdas yaitu "*Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19*", dan Program Unggulan Sumatera Barat Berkeadilan yaitu "*Mengembangkan kota dan kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat dan komunitas*". Namun demikian, kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2022 belum dapat mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang dibutuhkan guna mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang optimal. Sehingga untuk tahun anggaran ke depan, perlu adanya kebijakan anggaran yang dapat mengakomodasi dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi BPBD serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat, terutama sub kegiatan spesifik yang mengakomodasi tugas pokok dan fungsi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut.

Rencana program dan kegiatan BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2023 termasuk dalam Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dananya bersumber dari APBD, terdiri dari 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan, dengan jumlah kebutuhan anggaran/pagu indikatif sebesar Rp.16.410.640.000,- yang terbagi dalam program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.8.316.396.000,-.
2. Program Penanggulangan Bencana, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.8.094.244.000,-.

Adapun rencana program dan kegiatan BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1.** Rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				16.410.640.000				74.704.994.000
1 05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				16.410.640.000				74.704.994.000
1 05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi		100%	8.316.396.000			100%	10.404.994.000
1 05 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Prov. Sumbar	85%	163.772.800	APBD		85%	254.444.000
1 05 01 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	Prov. Sumbar	100%	5.202.027.907	APBD		100%	5.274.057.000
1 05 01 1 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	Prov. Sumbar	100%	174.927.800	APBD		100%	144.582.000
1 05 01 1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Prov. Sumbar	100%	169.817.000	APBD		100%	220.476.000
1 05 01 1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Prov. Sumbar	100%	504.557.534	APBD		100%	1.020.610.000
1 05 01 1 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Prov. Sumbar	100%	45.680.700	APBD		100%	90.825.000
1 05 01 1 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Prov. Sumbar	100%	1.420.652.259	APBD		100%	1.514.895.000
1 05 01 1 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Prov. Sumbar	100%	634.960.000	APBD		100%	1.885.105.000
1 05 03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana		71%	8.094.244.000			72%	64.300.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 03 1 01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase informasi rawan bencana provinsi yang disebarluaskan	Prov. Sumbar	56%	1.011.697.487	APBD		57%	5.155.000.000
1 05 03 1 02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana	Prov. Sumbar	56%	5.863.975.101	APBD		57%	52.481.000.000
1 05 03 1 03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Prov. Sumbar	76%	918.571.412	APBD		77%	4.176.000.000
1 05 03 1 04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang dikelola dengan baik	Prov. Sumbar	1 sistem	300.000.000	APBD		1 sistem	2.488.000.000
	<b>Jumlah</b>				<b>16.410.640.000</b>				<b>74.704.994.000</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, maka disusun rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berupa rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1.** Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2023

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Usuran Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										16.410.640.000	74.704.994.000	
1 05	Usuran Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										16.410.640.000	74.704.994.000	
1 05 01	Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100%					8.316.396.000	10.404.994.000	
1 05 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	163.772.800	254.444.000	
1 05 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 dokumen			15.434.000	38.985.000	
1 05 01 1 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-Perangkat Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA-SKPD, perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan perubahan DPA-SKPD) yang disusun	6 dokumen			60.992.000	85.139.000	
1 05 01 1 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	4 dokumen			72.150.000	94.677.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 05 01 1 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4 dokumen			15.196.800	35.643.000	
1 05 01 1 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							100%	<b>Persentase tertib administrasi keuangan</b>	100%	<b>5.202.027.907</b>	<b>5.274.057.000</b>	
1 05 01 1 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Prov. Sumbar			Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	50 orang			4.797.152.707	4.918.677.000	
1 05 01 1 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Prov. Sumbar			Jumlah ASN yang mendapatkan honor	12 orang			279.338.100	239.943.000	
1 05 01 1 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	100 dokumen			11.929.900	16.708.000	
1 05 01 1 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Prov. Sumbar			Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun	1 dokumen			91.301.400	66.325.000	
1 05 01 1 02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Prov. Sumbar			Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	2 dokumen			10.892.900	16.472.000	
1 05 01 1 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Prov. Sumbar			Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 dokumen			11.412.900	15.932.000	
1 05 01 1 03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>174.927.800</b>	<b>144.582.000</b>	
1 05 01 1 03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen usulan RKBMd pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan serta perhitungan standar kebutuhan yang disusun	1 dokumen			5.000.000	8.927.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 05 01 1 03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah BMD yang diasuransikan	1 unit			8.300.000	11.586.000	
1 05 01 1 03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	1 dokumen			928.300	1.296.000	
							Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honornya	2 orang			10.800.000	15.076.000	
1 05 01 1 03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang disusun	1 dokumen			5.878.000	12.514.000	
1 05 01 1 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah perangkat daerah	1 dokumen			144.021.500	95.183.000	
1 05 01 1 05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>169.817.000</b>	<b>220.476.000</b>	
1 05 01 1 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Prov. Sumbar			Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100 stel			75.000.000	75.185.000	
1 05 01 1 05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	45 dokumen			5.528.000	7.657.000	
							Jumlah dokumen kepegawaian (Anjab ABK, dll.) yang disusun	0 dokumen			-	-	
1 05 01 1 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Prov. Sumbar			Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang			42.552.750	72.395.000	
1 05 01 1 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Prov. Sumbar			Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	3 orang			46.736.250	65.239.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 05 01 1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	504.557.534	1.020.610.000	
1 05 01 1 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Prov. Sumbar			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	62 unit/buah				22.002.200	38.974.000	
1 05 01 1 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Prov. Sumbar			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	55 unit/buah				62.132.150	161.498.000	
1 05 01 1 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Prov. Sumbar			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1.083 unit/buah				28.386.200	71.948.000	
							Jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan	7 kali				9.100.000	12.703.000	
1 05 01 1 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Prov. Sumbar			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12.244 lembar				19.743.000	41.788.000	
1 05 01 1 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Prov. Sumbar			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 set				14.760.000	37.826.000	
1 05 01 1 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Prov. Sumbar			Jumlah tamu yang dilayani	5 orang				8.000.000	11.167.000	
1 05 01 1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	1 dokumen				336.878.884	639.743.000	
1 05 01 1 06 10	Penataan Arsip Dinamis Perangkat Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah arsip dinamis perangkat daerah yang dikelola	500 arsip				3.555.100	4.963.000	
1 05 01 1 06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah tenaga IT yang dimanfaatkan	0 orang				-	-	
							Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0 unit				-	-	

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah aplikasi/modul yang dikembangkan	0 aplikasi/modul			-	-	
1 05 01 1 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah								Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	45.680.700	90.825.000	
1 05 01 1 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Prov. Sumbar			Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	0 unit			-	-	
1 05 01 1 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Prov. Sumbar			Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0 unit			-	-	
1 05 01 1 07 05	Pengadaan Mebel			Prov. Sumbar			Jumlah pengadaan mebel	2 unit/set			4.585.400	39.710.000	
1 05 01 1 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Prov. Sumbar			Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 unit/set			25.000.000	30.820.000	
1 05 01 1 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Prov. Sumbar			Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 unit			16.095.300	20.295.000	
1 05 01 1 08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah								Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.420.652.259	1.514.895.000	
1 05 01 1 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Prov. Sumbar			Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	750 surat			5.234.550	13.364.000	
1 05 01 1 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Prov. Sumbar			Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	0 m3			-	-	
				Prov. Sumbar			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	1.375 KVA			165.000.000	183.785.000	
				Prov. Sumbar			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	100 mbps			94.922.259	105.728.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Prov. Sumbar			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	2 rekening			39.900.000	44.442.000	
1 05 01 1 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Prov. Sumbar			Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	23 orang			1.115.595.450	1.167.576.000	
1 05 01 1 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>634.960.000</b>	<b>1.885.105.000</b>	
1 05 01 1 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Prov. Sumbar			Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit			39.190.000	70.628.000	
1 05 01 1 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Prov. Sumbar			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	53 unit			465.873.000	1.280.875.000	
1 05 01 1 09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			Prov. Sumbar			Jumlah alat besar yang dipelihara	1 unit			31.817.000	43.541.000	
1 05 01 1 09 05	Pemeliharaan Mebel			Prov. Sumbar			Jumlah mebel yang dipelihara	25 unit			5.000.000	16.708.000	
1 05 01 1 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Prov. Sumbar			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit			26.080.000	31.177.000	
1 05 01 1 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Prov. Sumbar			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit			45.500.000	111.090.000	
1 05 01 1 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Prov. Sumbar			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit			19.000.000	48.341.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 05 01 1 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya			Prov. Sumbar			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit			2.500.000	282.745.000	
1 05 03	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>				<b>Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana</b>	<b>72%</b>					<b>8.094.244.000</b>	<b>64.300.000.000</b>	
1 05 03 1 01	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>								<b>Persentase informasi rawan bencana provinsi yang disebarluaskan</b>	<b>56%</b>	<b>1.011.697.487</b>	<b>5.155.000.000</b>	
1 05 03 1 01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen kajian risiko bencana provinsi yang disusun	1 dokumen			405.000.000	678.000.000	
1 05 03 1 01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)			Prov. Sumbar			Jumlah sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan di sekolah/kampus yang dilakukan	50 kali			272.256.994	2.420.000.000	
				Prov. Sumbar			Jumlah sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan di masyarakat yang dilakukan	4 kali			334.440.493	1.815.000.000	
				Prov. Sumbar			Jumlah kampanye/publikasi media/pameran/ pembuatan baliho kebencanaan yang dilakukan	1 kali			-	242.000.000	
1 05 03 1 02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>								<b>Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana</b>	<b>56%</b>	<b>5.863.975.101</b>	<b>52.481.000.000</b>	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 05 03 1 02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi yang disusun/direview	1 dokumen			350.000.000	-	
1 05 03 1 02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah pelatihan kebencanaan bagi relawan yang dilaksanakan	1 kali			273.552.902	666.000.000	
		Prov. Sumbar			Jumlah pelatihan kebencanaan bagi aparatur yang dilaksanakan	1 kali			273.552.901	666.000.000			
1 05 03 1 02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah laporan data dan informasi bencana yang disusun	1 dokumen			1.319.445.171	1.876.000.000	
		Prov. Sumbar			Jumlah sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana yang disediakan	0 unit			-	-			
1 05 03 1 02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana yang disediakan	2 jenis			500.965.432	15.125.000.000	
1 05 03 1 02 05	Pengelolaan Risiko Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah lembaga yang terlibat dalam pengelolaan risiko bencana yang ditingkatkan kapasitasnya	0 lembaga			-	484.000.000	
		Prov. Sumbar			Jumlah pertemuan/koordinasi/event/pelatihan antar stakeholder dalam rangka pengelolaan risiko bencana	1 kali			219.073.956	1.150.000.000			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Prov. Sumbar			Jumlah kerjasama antar lembaga dalam rangka pengelolaan risiko bencana	0 perjanjian kerjasama sama			-	242.000.000	
1 05 03 1 02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah penguatan/peningkatan kapasitas kelompok siaga bencana (KSB) yang dilakukan	30 kali			544.235.000	6.050.000.000	
				Prov. Sumbar			Jumlah penguatan/peningkatan kapasitas nagari tangguh bencana (DESTANA) yang dilakukan	10 kali			1.351.243.266	18.150.000.000	
1 05 03 1 02 07	Penanganan Pascabencana			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen JITU PASNA Provinsi yang disusun	1 dokumen			330.000.000	678.000.000	
				Prov. Sumbar			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap capaian JITU PASNA Provinsi	1 laporan			100.434.271	5.445.000.000	
1 05 03 1 02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah peningkatan/pengembangan kapasitas TRC Provinsi yang dilakukan	1 kali			106.297.146	490.000.000	
				Prov. Sumbar			Jumlah koordinasi TRC Provinsi yang dilakukan	1 kali			21.811.378	176.000.000	
1 05 03 1 02 09	Penyusunan Rencana Kontinjensi			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen rencana kontinjensi per jenis bencana yang disusun/direview	1 dokumen			300.000.000	678.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 05 03 1 02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah gladi kesiapsiagaan terhadap bencana tingkat provinsi yang dilakukan	1 kali			173.363.678	605.000.000	
1 05 03 1 02 11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) yang disusun/direview	0 dokumen			-	-	
1 05 03 1 03	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>								<b>Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi</b>	<b>76%</b>	<b>918.571.412</b>	<b>4.176.000.000</b>	
1 05 03 1 03 01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas			Prov. Sumbar			Jumlah laporan pelaksanaan penanganan kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas kewenangan provinsi yang disusun	0 laporan			-	182.000.000	
1 05 03 1 03 02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana kewenangan provinsi yang disusun	1 laporan			400.000.000	726.000.000	
1 05 03 1 03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah laporan pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana yang disusun	1 laporan			47.608.088	182.000.000	
1 05 03 1 03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah logistik/peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang disediakan	1 paket			422.000.000	2.420.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 05 03 1 03 05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana yang disusun	0 laporan			-	182.000.000	
1 05 03 1 03 06	Respon Cepat Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit			Prov. Sumbar			Jumlah laporan pelaksanaan penanganan epidemi/wabah penyakit yang disusun	1 laporan			48.963.324	484.000.000	
1 05 03 1 04	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>								<b>Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang dikelola dengan baik</b>	<b>1 sistem</b>	<b>300.000.000</b>	<b>2.488.000.000</b>	
1 05 03 1 04 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen regulasi penanggulangan bencana daerah tingkat provinsi yang disusun	0 dokumen			-	787.000.000	
1 05 03 1 04 02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah lembaga bencana daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	0 lembaga			-	466.000.000	
1 05 03 1 04 03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah perjanjian kerjasama yang ditetapkan	0 perjanjian kerja sama			-	182.000.000	
1 05 03 1 04 04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			Prov. Sumbar			Jumlah sistem informasi kebencanaan yang disediakan	0 sistem			-	-	
				Prov. Sumbar			Jumlah publikasi data dan informasi kebencanaan yang dilakukan	1 kali			75.000.000	448.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 05 03 1 04 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi			Prov. Sumbar			Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilakukan	2 kali			150.000.000	320.000.000	
				Prov. Sumbar			Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana	19 kabupaten/kota			75.000.000	285.000.000	
	<b>Jumlah</b>										<b>16.410.640.000</b>	<b>74.704.994.000</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD yang mengacu kepada Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Renja BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana yaitu mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian disertai dengan langkah yang tepat guna dan berdaya guna, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

Renja BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 menggambarkan indikator capaian kinerja dan sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode tahun 2023. Rencana program dan kegiatan BPBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 tertuang dalam Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang pendanaannya bersumber dari APBD, dengan jumlah kebutuhan anggaran/pagu indikatif sebesar Rp.16.410.640.000,-. Untuk mencapai target dan sasaran program dan kegiatan tahun 2023, diperlukan adanya kebijakan anggaran guna memenuhi kebutuhan anggaran program dan kegiatan tersebut, sehingga penyelenggaraan tupoksi BPBD di bidang penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat terlaksana secara optimal.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan program yang tertuang dalam Renja BPBD ini, diharapkan setiap unsur aparatur BPBD agar dapat menerapkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Disamping itu, dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan

dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Demikian Renja BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini disusun untuk dapat menjadi masukan dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

**Lampiran. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat**

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan agenda kerja Perangkat Daerah provinsi	V			
2.	Pengolahan data dan informasi	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	V			
4.	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah	V			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	V			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD Provinsi	V			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	V			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	V			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	V			
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah	V			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota	V			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	V			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	V			

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur	V			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	V			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah provinsi	V			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	V			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan	V			